

PERSAINGAN KEKUATAN SAUDI ARABIA (SUNNI) DAN IRAN (SYIAH) PADA KASUS KONFLIK KONTEMPORER (SURIAH DAN YAMAN)

Muhamad Syahdy Maulana

Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia, Indonesia

Email: muhamad.syahdy@ui.ac.id / syahdym@icloud.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kompetisi kekuatan antara Saudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) dengan melihat keterlibatan kedua negara tersebut dalam mewujudkan ekspansi pengaruh Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan ideologi. Hal tersebut bertujuan sebagai penyeimbang kekuatan kedua negara tersebut di kawasan Timur Tengah, khususnya pada kasus Suriah dan Yaman. Penelitian ini menggunakan teori balance of power dan pendekatan ideologi untuk mengidentifikasi pola konflik dan pendekatan yang dimainkan oleh kedua negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang konflik di antara kedua negara tersebut yang menggunakan pendekatan ideologi untuk menggapai tujuan politiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dalam menjawab permasalahan dalam penelitian dimaksud. Penelitian ini menunjukkan bahwa Saudi Arabia dan Iran memainkan peran yang sangat signifikan pada konflik Suriah dan Yaman dalam berbagai cara, seperti pendanaan dan pemberian bantuan logistik militer. Pendekatan ideologi tidak pernah lepas dari misi yang dijalankan oleh kedua negara tersebut. Dalam keberhasilannya, sejauh ini Iran berhasil dalam membangun aliansi dengan pemerintah lokal, sehingga Iran mendapatkan kemenangannya di Yaman. Namun tidak dengan Saudi Arabia yang walaupun negara tersebut telah membangun aliansi dengan berbagai cara, akan tetapi sejauh ini tidak menunjukkan keberhasilannya.

Kata kunci: *Balance of Power, Iran, Saudi Arabia, Sunni, Syiah, Timur Tengah*

PENDAHULUAN

Perseteruan dimulai pada 14 abad silam ketika perdebatan mulai memanas mengenai siapa yang sepatutnya menjadi pemimpin yang menggantikan Muhammad SAW setelah wafatnya saat itu. Perseteruan tersebutlah yang menjadi cikal-bakal pada masa-masa setelahnya melahirkan perpecahan golongan muslim menjadi dua faksi, yaitu Sunni dan Syiah. Sunni pada akhirnya mendominasi jumlah populasi muslim di Timur Tengah karena pengaruh paham Islam Sunni yang dianut oleh Turki Usmani selama menguasai daratan Timur Tengah dan ditambah lagi dengan perluasan pergerakan Wahabi di semenanjung Arab yang memiliki kesamaan corak ideologi, yakni Sunni. Pada dewasa ini, Sunni yang diwakili oleh Saudi Arabia di kawasan Timur Tengah memainkan peran yang sangat signifikan di Timur Tengah dalam

segala bidang. Kesamaan ideologi dan kepentingan membuat negara-negara berpaham Sunni bekerja sama di dalam kancah internasional dalam skala kecil dengan membentuk forum *Gulf Cooperation Council (GCC)*¹ terdiri atas enam anggota negara dan dalam skala besar di Liga Arab² yang terdiri atas dua puluh dua anggota negara.

¹GCC didirikan pada 25 Mei 1981 oleh para petinggi negara-negara Teluk Arab di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dewan kerjasama ini menyepakati kerangka kerjasama yang didasarkan pada kesamaan tujuan dan kesamaan Islam. Lihat selengkapnya di <http://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/Pages/StartingPointsAndGoals.aspx>. Diakses pada 8 April 2019, pukul 18.05 WIB.

²Liga Arab didirikan pada 22 Maret 1945 oleh beberapa negara Arab, seperti Mesir, Jordan, Yaman, Saudi Arabia, Lebanon dan Suriah. Lihat selengkapnya di

Pada 1979, faksi muslim yang bergolongan Syiah mulai unjuk kekuatan dalam percaturan politik di Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Ali Khoemai, sehingga mampu menggulingkan pemerintah sekuler pada kala itu dan melahirkan corak kepemimpinan baru di Iran yang berlandaskan teokrasi. Pasca-revolusi tersebut, Iran kerap kali menghembuskan ide-ide revolusi di Timur Tengah untuk mendorong perubahan kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut. Penyebaran ide revolusi ke seluruh penjuru negeri muslim secara umum didasarkan pada keyakinan para ulama penggagas revolusi bahwa pemerintahan yang berasaskan Syiah Imamiyah tidak dibatasi oleh batas-batas geografis sehingga ide tersebut merupakan pesan universal (Charin, 2016, pp. 6-7). Ideologi inilah yang menjadikan dasar pemerintah Teheran untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah secara umum dan di wilayah Teluk secara khusus yang didominasi oleh paham Sunni yang dipimpin oleh Saudi Arabia. Mengingat bahwa peran Saudi Arabia di Timur Tengah sangatlah besar dan hanya beberapa negara di Timur Tengah yang dipengaruhi oleh Iran, seperti Suriah, Lebanon dan Yaman pada dewasa ini.

Hingga sampai dengan saat ini, Saudi Arabia dan Iran bersaing secara ketat dalam memberikan pengaruhnya sebagai wujud penyeimbang kekuatan di Timur Tengah. Atas persetujuan kedua negara tersebut yang hingga sampai saat ini belum berakhir, maka menimbulkan pertanyaan sejauhmana kedua negara tersebut memperluas pengaruhnya di Timur Tengah khususnya dalam konflik Suriah dan Yaman? dan seberapa efektifnya kekuatan yang dibangun tersebut untuk mencapai penyeimbang kekuatan di Timur Tengah?. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori perimbangan kekuatan (*balance of power*). Morgenthau menjelaskan perimbangan kekuatan dalam beberapa makna, di antaranya adalah sebagai politik yang bertujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu; sebagai suatu keadaan nyata; dan sebagai distribusi kekuasaan/kekuatan yang kurang lebih sama. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa aspirasi beberapa bangsa untuk memperoleh kekuatan, masing-masing negara berupaya untuk mempertahankan atau

menumbangkan *status quo* dengan mempertimbangkan perkembangan ke arah suatu susunan (konfigurasi) yang disebut perimbangan kekuatan dan politik yang bertujuan melestarikannya (Morgenthau, 2010, p. 199).

Dalam usaha perimbangan kekuatan tersebut di Timur Tengah, khususnya Suriah dan Yaman, baik Saudi Arabia maupun Iran menggunakan pendekatan ideologis untuk memuluskan upaya memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara lain demi menjalankan visi perimbangan kekuatan tersebut. Ideologi merupakan cita-cita berbagai macam masalah politik yang sering dilaksanakan sebagai suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok (dalam hal ini negara) atau lapisan masyarakat (Kansil, 2005, p. 27). Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar dari aksi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dalam membendung kekuatan antara satu dengan lainnya sebagai wujud penyeimbangan kekuatan di kawasan. Pada satu sisi, pihak Sunni beranggapan bahwa ideologi Syiah sangat membahayakan, oleh karena itu, negara-negara berpaham Sunni yang dimotori dan dikepalai oleh Saudi Arabia merasa perlu untuk membendung ideologi tersebut agar tidak masuk serta merusak tatanan sosial dan politik yang selama ini dibangun di Timur Tengah. Akan tetapi di lain sisi, Syiah yang menjadi ideologi negara Iran mencoba dengan berbagai cara untuk memasuki dan memperluas ideologinya di kawasan Timur Tengah dengan berbagai cara dengan visi penyebaran paham Syiah Imamiyahnya.

Dalam pembahasan persaingan kekuatan antara Saudi Arabia dan Iran di Timur Tengah ini, peneliti membatasi pada masalah-masalah kontemporer yang terjadi di Suriah dan Yaman. Hal tersebut dapat menjadi contoh maupun sampel dari rangkaian peristiwa persaingan penyeimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Mengingat bahwa kedua dua negara tersebut menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dan selalu memainkan peran yang aktif di Timur Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitik

untuk menjawab secara komprehensif penelitian ini.
permasalahan yang dikemukakan dalam

Tabel 1. Analisis Konflik

	Negara	Pendekatan ideologis	Bantuan militer	Pendekatan jejaring	Tesis	Hasil
Kasus Suriah	Saudi Arabia	√			Menggunakan pendekatan ideologi dalam membangun kerja sama dengan kelompok oposisi dan menjadikan ideologi tersebut sebagai legitimasi untuk mendukung suara dari dunia internasional.	Sejauh ini, keberhasilan ditampakkan oleh Iran yang berhasil mempertahankan kekuasaan rezim Assad dari gangguan internal maupun eksternal. Hal tersebut juga merupakan wujud atas <i>balance of power</i> yang dimainkan oleh Iran untuk menyeimbangi kekuatan Saudi di Timur Tengah.
			√		Memberikan pendanaan maupun bantuan logistik militer kepada kelompok oposisi untuk melawan rezim Assad.	
				√	Membangun jejaring kepada kelompok oposisi yang menentang rezim Assad sesaat terjadinya <i>Arab Spring</i> .	
	Iran	√			Membangun kerja sama yang didasarkan pada kesamaan ideologi.	
			√		Memberikan bantuan militer strategis kepada pemerintah Suriah yang telah terjalin kerja sama sejak lama.	
				√	Kedekatan hubungannya dengan pemerintah Assad menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan kekuasaan rezim Assad.	
Kasus Yaman	Saudi Arabia	√			Membangun hubungan yang didasarkan pada kesamaan ideologi dengan pemerintah dan menjadikan pendekatan ideologi tersebut sebagai legitimasi untuk mendukung suara dari dunia internasional.	Hingga sampai dengan saat ini, keberhasilan kasus di Yaman ini diperoleh oleh Iran beserta sekutunya Houthi yang berhasil menguasai pusat pemerintahan di Yaman. Hal tersebut juga merupakan wujud atas strategi <i>balance of power</i> yang dimainkan oleh Iran untuk menyeimbangi kekuasaan Saudi yang telah mendominasi di Timur Tengah.
			√		Memberikan bantuan kemiliteran dengan bekerja sama dengan negara-negara Arab lainnya dalam <i>Decisive Storm</i> untuk menumpas kelompok Houthi	
				√	Pendekatan kerja sama strategis dengan pemerintah Yaman sejak lama.	
	Iran	√			Menjalin hubungan dengan kelompok Syiah lokal (Houthi) yang memiliki ideologi sama yang berpaham Imamiyah.	
			√		Pemerintah Iran memberikan dukungan berupa logistik militer untuk memperkuat posisi Houthi di Yaman.	
				√	Pemerintah Iran membangun kerja sama dengan baik kepada kelompok Syiah lokal di Yaman, khususnya Houthi.	

Sumber: Abstraksi Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik di Suriah

Suriah merupakan salah satu negara yang tidak terlepas dari fenomena *Arab spring* yang

menjalar di Timur Tengah. Fenomena tersebut bermula pada Maret 2011 ketika lima belas anak-anak ditangkap karena menuliskan slogan “*the people want the regime to fall*” di dinding kota Dara’a, Suriah Selatan. Berita tersebut pun meluas hingga menyebabkan gelombang protes masyarakat Suriah untuk menentang pemerintah. Aksi protes tersebut pun diikuti dengan pembakaran gedung-gedung, penghancuran patung mantan Presiden Suriah, Hafiz Assad (Abouzeid, 2011).

Dalam menanggapi fenomena tersebut, Iran yang merupakan sekutu utama Suriah membantu pemerintah Suriah untuk meredam pergolakan yang terjadi di negaranya. Iran mengirim penasihat-penasihat militer dari *Islamic Revolutionary Guards Corps* (IRGC) untuk melatih personel serta memberikan bantuan lainnya untuk memperkuat pasukan Suriah dalam melawan para demonstran dan oposisi anti pemerintah, hal ini bertujuan untuk meredam krisis internal yang ada di Suriah. Di samping itu, Iran juga memberikan bantuan \$23 juta dollar Amerika kepada Suriah dan membangun pangkalan militer di Latakia untuk memfasilitasi pengiriman senjata dari Iran ke Suriah (Baidawi, 2012, p. 89). Pada saat yang bersamaan, Iran pun mengerahkan kekuatan Hizbullah yang memiliki basis di Lebanon untuk membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghadapi pemberontakan yang terjadi di dalam negeri Suriah pada tahun 2013 yang didanai oleh kedua negara (Charin, 2016, p. 8). Kerja sama erat kedua negara, yakni Iran dan Suriah telah terjalin sejak pecahnya perang Iran-Irak pada tahun 1980-1988. Pada saat itu, pemerintah Damaskus mengambil kebijakan yang sangat berbeda dengan negara-negara Arab lainnya, yaitu dengan memilih berpihak pada Iran (Baidawi, 2012, p. 88).

Persekutuan tersebut yang menjadi kerja sama strategis antar kedua negara menguntungkan kedua negara dalam menghadapi pergolakan di Timur Tengah. Oleh sebab itu tidak heran ketika Suriah menghadapi konflik internalnya, Iran membantu dengan segenap kekuatan yang ada untuk menopang kekuatan rezim Assad. Di samping itu, dekatnya letak geografis antara Suriah dan Iran memudahkan kedua negara untuk saling bekerja sama dalam bidang-bidang strategis. Hizbullah yang juga merupakan kaki tangan pemerintah Iran di Lebanon juga menguntungkan posisi Suriah

saat terjadinya konflik, sebab kelompok tersebut didukung oleh persenjataan militer yang lengkap dapat membantu Suriah menghalau pemberontakan yang terjadi pada saat Arab Spring tersebut. Kuatnya posisi tawar Hizbullah di Timur Tengah menjadi kekuatan tersendiri bagi Iran dan sekutunya untuk mengandalkan organisasi ini dalam beberapa konflik yang ada di kawasan.

Atas kerja sama yang terjalin terhadap kedua negara tersebut yang dibangun dengan asas resiprokalitas dan strategis, jelas bahwa keduanya merupakan sekutu bersama yang cukup diperhitungkan dalam menanggulangi krisis yang terjadi di Suriah. Koalisi yang ditambah dengan Rusia dan Cina ini pun terbukti berhasil mempertahankan posisi kepemimpinan Bashar al-Assad di Suriah hingga saat ini.

Jika dilihat dari substansi revolusi yang selalu digaungkan oleh Iran merupakan suatu yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Suriah. Jika *Arab Spring* yang melanda Timur Tengah menjadi kunci terbukanya gerakan revolusi untuk mengganti corak kepemimpinan di Timur Tengah yang sebagian besarnya monarki, otoriter dan berpaham Sunni, maka hal tersebut tidak berlaku untuk Suriah, padahal banyak kalangan menilai bahwa semasa kepemimpinan Assad pun cukup otoriter. Hal ini menjadi wajar terjadi, sebab kerja sama yang terjalin antara Suriah dan Iran sangat kuat dan “kemesraan” hubungan kedua negara tersebut pun sangat terjaga. Iran selama ini memberikan semacam legitimasi bagi rezim Ba’ath di Damaskus. Hal ini dilatarbelakangi karena Suriah didominasi oleh Sekte Alawiyah, yakni sekte minoritas dalam Islam dan beberapa pemimpin agama Syiah telah memperkuat legitimasi rezim di Damaskus dengan alasan bahwa Sekte Alawiyah adalah bagian dari keluarga Syiah, sehingga hal inilah yang menjadi alasan persekutuan antara Iran dan Suriah tetap terjaga (Byman, 2006). Dengan adanya kerja sama strategis dan kesamaan ideologi yang dianut kedua negara walaupun secara literal berbeda, hal tersebut menjadi kunci hubungan bilateral antara Suriah dan Iran. Di samping bahwa Iran menilai Suriah sebagai negara strategis dan negara sahabat yang dapat menguntungkan eksistensi Iran di Timur Tengah. Oleh sebab itu, hembusan revolusi Iran terhadap corak kepemimpinan otoriter di Timur Tengah tidak

terdengar dan terhembus di Suriah, karena hal tersebut dilatarbelakangi oleh kerja sama kedua negara yang sangat strategis tersebut.

Berbanding terbalik apabila hal tersebut ditarik dalam konteks hubungan antara Suriah dan Saudi Arabia. Kedekatan, kerja sama strategis menjadi suatu hal yang tidak didapatkan oleh Saudi Arabia. Walaupun Saudi Arabia menjalin hubungan baik dengan pemerintah Assad sebelum *Arab Spring*, akan tetapi “kemesraan” dan hubungan strategis tidak dimiliki oleh Saudi Arabia. Oleh karena itu, dengan krisis yang terjadi di Suriah, Arab Saudi berpandangan bahwa hal tersebut merupakan kesempatan baginya untuk memperluas pengaruhnya di negara tersebut selepas tumbang rezim yang selama ini berkuasan dibayangkan oleh kekuatan Iran yang berideologi Syiah.

Maka sesaat terjadinya krisis tersebut, Saudi Arabia secara cepat mengubah sikap politik luar negerinya dan menjadi negara pertama yang menentang pemerintahan Bashar Al Assad. Melalui pernyataan resmi kenegaraannya, Raja Abdullah menyatakan bahwa pemerintah Suriah tak elak sebagai mesin pembunuh dan meminta kepada masyarakat Suriah untuk menentang pemerintah sebagai respon atas jatuhnya korban demonstran. Tidak sampai di situ, Pemerintah Riyadh selanjutnya menarik duta besarnya di Damaskus sebagai protes penentangan Saudi Arabia terhadap Pemerintah Damaskus (Nakamura, 2013).

Strategi yang dilakukan Saudi Arabia terhadap krisis di Suriah tidak berhenti pada kebijakan menentang pada pemerintahan Assad saja, tetapi juga direalisasikan dengan dukungan Arab Saudi terhadap kelompok oposisi melalui bantuan pendanaan maupun logistik peperangan. Penggalangan dana yang disebut sebagai bantuan perlawanan di Suriah dimotori oleh Syeikh Al-Arifi dengan mengumpulkan bantuan dari seluruh aktifis dan masyarakat di Saudi. Syeikh Al-Arifi merupakan advokat dan sekaligus perwakilan dari gerakan dukungan Arab Saudi terhadap oposisi Suriah. Hasil dari penggalangan dana pun terkumpul sebesar US\$124,73 dolar dan akan diserahkan kepada kelompok oposisi Suriah, yakni FSA dan SNC. Tidak berhenti dipendanaan saja, pada bulan Mei 2012 dilaporkan bahwa negara-negara Teluk Arab seperti Arab Saudi dan Qatar memutuskan

untuk menyuplai logistik peperangan ke kelompok oposisi FSA melalui wilayah selatan Turki. Selain itu, New York Times dan BBC melaporkan bahwa Arab Saudi dan Qatar telah mengirimkan senjata-senjata ringan ke oposisi di Suriah yang diperkirakan jalur penyelundupan tersebut melalui perbatasan antara Turki dan Suriah dan melalui Jordan. Hal ini diperkuat dengan laporan BBC yang melansir berita bahwa ditemukannya senjata milik Arab Saudi di basis kelompok oposisi Suriah di Aleppo (Ikhsan, 2015, pp. 10-11).

Arab Saudi juga menempuh upaya diplomasi politik melalui forum *Arab League* pada November 2012. Forum tersebut membahas permasalahan krisis yang ada di Suriah hingga lahirnya kesepakatan bahwa perlunya sanksi terhadap Suriah dan membawa isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Arab Saudi beserta negara-negara Arab lainnya sepakat (kecuali Lebanon dan Yaman) untuk membekukan keanggotaan Suriah di forum *Arab League* serta menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Suriah, yakni pembekuan aset kepemilikan Suriah di negara Arab lain, pemutusan hubungan ekspor maupun impor dan menghentikan kerja sama finansial lainnya di Bank Suriah. Diharapkan melalui upaya diplomasi ini, Saudi Arabia dapat menekan Suriah dalam skala regional, sehingga menjadikan ekonomi Suriah terisolasi dari dunia Arab pada umumnya (Ikhsan, 2015, pp. 8-9).

Krisis yang terjadi di Suriah memberikan harapan yang besar bagi Arab Saudi untuk mengakhiri koalisi antara Suriah dan Iran di kawasan Timur Tengah yang telah terjalin dengan baik antara *government to government* pasca berdirinya Republik Islam Iran pada 1979. Melalui kebijakan anti-Iran yang dilancarkan oleh pemerintah Saudi menjadi kekuatan tersendiri untuk menekan kubu Irandan pada akhirnya Iran akan kehilangan investasinya di Suriah, baik dalam ekonomi maupun politiknya. Dengan pergantian rezim nantinya dan menggantinya dengan kepemimpinan yang berhaluan yang sama dengan Saudi Arabia, maka cita-cita untuk membendung kekuatan Iran di Timur Tengah dapat terwujud, di samping upaya menyeimbangi kekuatan Iran di Timur Tengah dapat terealisasi.

Saudi Arabia memandang bahwa pergantian kepemimpinan yang lebih pro

terhadap Saudi Arabia maupun yang berhaluan Sunni merupakan sebuah keniscayaan, mengingat masyarakat Suriah didominasi oleh Sunni dengan presentase 75% dari 22.5 juta jiwa sedangkan Syiah sebanyak 15% dari populasi tersebut (Akbar, 2016). Dengan bergantinya rezim yang selama ini dibayangkan oleh Iran, maka akan membuka jalan bagi Saudi Arabia untuk memasuki negara tersebut pasca kepemimpinan Suriah yang baru yang lebih diinginkan dan sejalan dengan Saudi Arabia secara khusus. Maka hal ini sejalan dengan arah kebijakan politik luar negeri Saudi Arabia ialah “muslim solidarity and unity” dengan menerapkan sikap proaktif dalam mendukung pemerintahan Sunni dan lebih anti terhadap Syiah, baik dalam bentuk pemerintahan maupun ideologi keagamaan (Dacey & Levy, 2013, p. 27).

Konflik di Yaman

Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya menjadi awal mula pergerakan munculnya pemberontakan oleh sekelompok warga yang berhaluan Syiah, yakni Houthi. Lahirnya kelompok Houthi di Yaman bermula dari keretakan hubungan antara Badruddin al-Houthi dengan ulama-ulama Syiah yang beraliran Zaidiyah. Hal tersebut dikarenakan fatwa-fatwa ulama Zaidiyah yang menurut Badruddin al-Houthi telah menyisihkan pokok ajaran Syiah. Sejak saat itulah, dirinya beralih ke aliran Imamiyah dan kemudian pergi ke Iran untuk mendalami pemahaman tersebut (Charin, 2016, p. 3).

Bersamaan dengan kepergian Badruddin ke Iran, Husain bin Badruddin al-Houthi –anak dari Badruddin al-Houthi-- mengundurkan diri dari partai al-Haq, yakni partai yang menginspirasi suara dan pemikiran Syiah Zaidiyah. Kemudian, Husain mendirikan kelompok baru dengan nama Syiah Houthi dengan menisbatkan namanya pada kelompok tersebut. Awal mula pergerakan kelompok ini hanya pada bidang keagamaan, kemudian bergabung dengan pemerintah untuk melawan Partai Persatuan Yaman yang merupakan perwakilan dari masyarakat bermazhab Sunni. Akan tetapi, pada 2002, kelompok ini berbalik arah menjadi kelompok oposisi dalam pemerintahan (Charin, 2016).

Keberhasilan kelompok Houthi dapat dilihat dengan berhasilnya kelompok tersebut

menyingkirkan pemerintahan yang sah dan menguasai pusat ibu kota Yaman di Sana'a. Kesuksesan kelompok Houthi tersebut tidak bisa menafikan peran Iran dalam membantu kelompok ini sejak 2009. Iran berhasil menyuplai berbagai bantuan kemiliteran yang diperlukan Houthi dalam memperlancar suksesi kekuasaan di Yaman.

Intervensi yang dilakukan Iran melalui kepanjangan tangannya, Houthi, merupakan sejalan dengan visi Iran dalam memperluas ideologi Syiah Imamiyahnya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran pasal 12 dan 72 yang berbunyi bahwa Syiah Imamiyah bukan hanya sebagai agama resmi negara Iran, melainkan prinsip dasar dalam bernegara. Pasca ditetapkannya konstitusi Iran pascarevolusi pada 1979, sang pemimpin revolusi, Imam Khomeini menegaskan bahwa Iran akan melakukan ekspansi ideologinya ke penjuru dunia. Hal tersebut berdasarkan keyakinan para ulama penggagas revolusi bahwa pemerintah yang berasaskan Syiah Imamiyah tidak dibatasi oleh batas-batas geografis suatu negara, oleh karena itu, ideologi tersebut merupakan pesan universal (Charin, 2016).

Tidak heran bahwa kedekatan Syiah Houthi dengan Iran berdasarkan ideologi yang dianut oleh keduanya, yakni Syiah Imamiyah. Dengan kesamaan ideologi tersebut, maka Iran tidak meragukan kelompok ini untuk menjadi kepanjangan tangan pemerintah Teheran dalam menyebarkan ideologi Syiah di wilayah Teluk Arab, khususnya di Yaman, dan untuk memerangi pemerintah yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah dalam negerinya. Di samping itu, saat penguasaan pemerintah yang berlandaskan Sunni, seringkali kelompok Syiah yang berada di Yaman terpinggirkan, sehingga Iran dan Houthi melihat bahwa hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk memulai perubahan dalam struktur politik dan sosial masyarakat Yaman. Houthi di Yaman menjadi kesempatan bagi Iran sebagai pintu masuk untuk menyebarkan ideologi imamiyah dan menggaungkan revolusi di Teluk Arab, mengingat bahwa di wilayah Teluk Arab banyak kelompok Syiah yang hidup di bawah represif pemerintah yang berkuasa, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan Iran termotifasi untuk menyebarkan gagasan revolusi di dunia Arab.

Untuk memperkuat posisi Houthi kuat di Yaman, pemerintah Teheran mengirimkan bantuan dalam bentuk logistik persenjataan yang dimulai sejak tahun 2009. Iran secara rahasia mengirim ratusan roket anti-tank dan anti-helikopter kepada kelompok Houthi. Laporan para ahli ini menguatkan anggapan bahwa Iran menjadi pihak yang membantu Houthi yang mengindikasikan lima kapal-kapal tersebut membawa logistik persenjataan yang ditujukan ke Yaman dan kemudian persenjataan tersebut diturunkan ke sebuah peternakan di provinsi Sa'ada untuk kelompok Houthi (Landry, 2015).

Atas intervensi Iran dalam konflik di Yaman ini, membuat konflik antara Saudi Arabia dan Iran kian meruncing. Koalisi Arab yang dipimpin oleh Saudi Arabia dalam upaya intervensi konflik tersebut menjadikan Yaman sebagai tempat pertarungan antara Saudi dan Iran. Dalam hal ini, Saudi melihat bahwa ancaman yang sangat berbahaya apabila kelompok Houthi yang didukung oleh Iran kian menguat, mengingat basis awal mereka berada di dekat perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman. Sehingga, Saudi Arabia menganggap diperlukannya intervensi untuk mengamankan stabilitas negaranya dari kelompok ini. Maka kemudian Saudi Arabia membuat aliansi dengan negara-negara lainnya seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Yordania, Maroko, Mesir dan Sudan yang dinamakan dengan *Decisive Storm* (Budiman, 2016, p. 3).

Tidak dipungkiri bahwa intervensi Iran terhadap kelompok Houthi di Yaman merupakan langkah awal Iran dalam menyebarluaskan pengaruhnya dan menjadi pintu masuk Iran di Teluk Arab untuk menyebarkan ideologi Syiah di wilayah tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, hal tersebut bertujuan sebagai perimbangan dominasi kekuasaan Saudi Arabia di Timur Tengah secara umum maupun di Teluk Arab secara khusus. Intervensi Iran terhadap kelompok Kouthi ini bukanlah semata-mata hanya kebaikan Iran, akan tetapi ada orientasi ekonomi yang dapat menguntungkan Iran apabila Houthi berhasil menguasai Yaman.

Begitu halnya dengan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi pun merupakan upaya mereka untuk membendung perluasan kekuasaan Iran yang berbasis Syiah di Timur Tengah. Mengingat bahwa negara-negara di

Timur Tengah khususnya Teluk Arab mayoritas menganut Sunni dan pengaruh Saudi atas negara-negara ini pun sangat besar. Tidak terkecuali Yaman sebelum konflik melanda negeri ini, pemerintah yang syah pun termasuk pihak yang sangat bergantung dan dipengaruhi oleh Saudi Arabia. Pemerintah Saudi merasa sangat perlu mengamankan Yaman dari Iran, baik dalam membendung kekuatan Iran di wilayah Teluk Arab maupun menyelamatkan potensi ekonomi yang terkandung dalam geografis Yaman.

Letak strategis Yaman sangat potensial apabila ditinjau dari geografisnya. Dengan tingkat kesuburan tanah, curah hujan dan terlebih lagi posisi Bab al-Mandeb menjadikan Yaman diincar oleh banyak negara besar, tidak terkecuali Saudi Arabia maupun Iran. Saudi Arabia dan Iran sangat memperhitungkan betul posisi Yaman, sehingga kedua negara tersebut secara maksimal memperjuangkan kekuasaannya di Yaman untuk kepentingan politik dan ekonomi. Maka tidak heran apabila kedua negara tersebut menggunakan pendekatan ideologi untuk melegitimasi langkahnya dalam menguasai Yaman di mata dunia internasional.

Strategi Pendekatan Saudi Arabia dan Iran di Timur Tengah

Saudi Arabia dan Iran merupakan negara yang mengakui Islam sebagai ideologi berpolitiknya, sehingga kedua negara tersebut saling tarik-menarik dalam merebut kekuasaan di Timur Tengah. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam konflik Suriah dan Yaman menjadi ajang yang menarik untuk melihat bagaimana kedua negara tersebut menonjolkan kekuatannya satu sama lain untuk mencapai tujuan politik luar negerinya, yaitu memperluas kekuasaannya dan menyeimbangi kekuatan dalam menghadapi kekuatan satu sama lain di Timur Tengah.

Tidak diragukan lagi bahwa pengaruh Saudi Arabia di wilayah Teluk sangat terlihat dalam berbagai aspeknya, khususnya melalui kesamaan ideologi yang dianutnya, yaitu Islam Sunni. Negara-negara yang berbasis ideologi Sunni dan menjadi aliansi Saudi Arabia ialah Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Melalui kesamaan tujuan dan ideologi tersebut, dibuatlah kerja sama *Gulf Cooperation Council (GCC)* yang anggotanya merupakan aliansi Saudi Arabia tersebut yang

notabeneanya bercorak monarki di Teluk Arab. Sejak didirikan organisasi tersebut, GCC telah menjadi alat yang sangat efektif untuk mengedepankan pendekatan konservatif pada tiap-tiap anggotanya dalam menyelesaikan isu keamanan regional (Tyler & Boone, 2012, p. 13). Dalam skala yang lebih besar, terdapat organisasi Liga Arab yang di dalam organisasi tersebut, Saudi Arabia melakukan pendekatan yang sama terhadap negara anggota organisasi tersebut. Melalui organisasi-organisasi inilah, pemerintah Saudi Arabia diuntungkan dengan memainkan perannya untuk menjalin hubungan yang erat dengan para elit di negara-negara tersebut yang mayoritas berpaham Sunni di samping atas dasar kesamaan kepentingan politik.

Pendekatan tersebut tidak didapatkan oleh Iran sebagai negara yang berusaha menyeimbangi Saudi Arabia di Timur Tengah dan bertujuan ekspansi ideologi di wilayah tersebut. Iran memiliki strategi lainnya dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan membangun aliansi kepada komunitas-komunitas Syiah lokal di negara-negara Timur Tengah. Hal tersebut bertujuan untuk menekan pemerintah di Timur Tengah secara umum dan di Teluk Arab secara khusus yang berbasis Sunni melalui isu-isu yang dianggap strategis oleh pemerintah Teheran. Dalam beberapa aspek, hal tersebut sangat efektif mengingat masyarakat Syiah sangat rentan terhadap propaganda Iran dibandingkan dengan Muslim Sunni (Tyler & Boone, 2012, p. 13). Keberhasilan melalui pendekatan ideologi tersebut dapat dinilai cukup berhasil dalam memperluas pengaruhnya di kawasan, seperti yang telah terjadi di Yaman dengan membangun jejaring untuk menguatkan legitimasi Syiah Houthi di Yaman. Demikian pula keberhasilan hubungan antara Iran dengan Suriah yang dibangun berdasarkan kesamaan Ideologi dan kerja sama strategis antar negara.

Efektifitas strategi tersebut yang dimainkan oleh kedua negara berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam beberapa kasus. Pada kasus Yaman, Pemerintah Riyadh bahkan melakukan intervensi langsung terhadap krisis yang terjadi di Yaman untuk menumpas kelompok Houthi di Yaman. Namun, upaya tersebut sejauh ini pun gagal dicapai walaupun Saudi Arabia beserta aliansinya menggempur kelompok tersebut hingga akhirnya Houthi merebut kekuasaan di Sana'a dan menjalani kepemimpinan di

Yaman. Dan yang menjadi tantangan terbesar Saudi Arabia saat ini ialah persaingannya dengan Iran di Suriah yang sampai detik ini belum menemukan titik temunya. Dengan aliansi yang selama ini dibangun pemerintah Damaskus dengan pemerintah Teheran ditambah Moskow dan Beijing membuat krisis tersebut berkepanjangan dan mempertahankan legitimasi kepemimpinan Bashar al-Assad. Dalam krisis ini, pemerintah Damaskus diuntungkan dengan kehadiran Iran dan negara lainnya untuk mempertahankan kekuasaannya sampai dengan hari ini walaupun banyak negara termasuk negara-negara Arab menentang pemerintah Bashar Al Assad. Maka, jika Saudi Arabia ingin melepaskan pengaruh Iran di Suriah, hal tersebut menjadi tantangan besar untuk Saudi Arabia, mengingat betapa besarnya pengaruh Iran di Suriah sampai dengan saat ini dan pemerintah Teheran pun tidak akan dengan mudahnya membiarkan Suriah jatuh ke tangan rivalnya, Saudi Arabia.

KESIMPULAN

Persaingan kekuatan di Timur Tengah sangat jelas terlihat oleh dua negara besar yang sama-sama menganut Islam akan tetapi berbeda dalam ideologi keislamannya. Saudi Arabia yang menganut Sunni menjadi pemain utama dalam Timur Tengah, mengingat sebagian besar negara-negara Timur Tengah menganut pemahaman yang sama dengan Saudi, yakni Sunni. Akan tetapi Iran pun memainkan peran yang sangat signifikan di berbagai isu-isu di Timur Tengah untuk mencapai tujuannya dalam menyeberluaskan ideologi yang dianutnya di sisi lain memiliki misi penyeimbang kekuatan Saudi Arabia di Timur Tengah.

Saudi Arabia yang selama ini membangun aliansi yang berlandaskan kesamaan ideologi Sunni menghadapi tantangan yang besar untuk membendung pengaruh Iran di Timur Tengah yang dapat dilihat melalui kasus di Suriah dan Yaman. Dalam menghadapi kekuatan satu dengan lainnya, kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang sama, yaitu pendekatan kesamaan ideologi. Melalui Forum internasional seperti Liga Arab dan GCC Saudi Arabia mampu merangkul pemimpin lokal yang memiliki kesamaan ideologi untuk membendung kekuatan dan ideologi Iran di

Timur Tengah. Akan tetapi, Iran pun memiliki strategi yang sama pendekatannya dengan Saudi akan tetapi tidak melalui forum internasional, yaitu melalui membangun jejaring dengan masyarakat lokal yang memiliki pemahaman yang sama dengannya. Masyarakat lokal inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Iran untuk menjadi tangan panjangnya dalam menyebarkan ideologi dan meletakkan pengaruhnya seperti dalam kasus Yaman. Dengan jatuhnya Yaman di bawah kendali Iran, maka kekuatan Iran di Timur Tengah menjadi bertambah luas. Dalam konteks negara lain seperti Suriah, Pemerintah Iran memiliki hubungan yang telah terjalin erat dengan Pemerintah Suriah yang berlandaskan kerja sama strategis dan kesamaan ideologi, sehingga kedua negara tersebut diuntungkan keberadaannya satu sama lain dalam memperkuat legitimasi dan eksistensi negaranya di Timur Tengah.

Dalam melihat eskalasinya, sejauh ini Iran memiliki keberhasilan dalam upaya perimbangan kekuatan di Timur Tengah seperti dalam kasusnya di Yaman dan Suriah. Sedangkan Saudi Arabia mengalami kegagalan dalam upaya membendung kekuatan Iran dan mencegah penyebaran ideologinya untuk memasuki wilayah Timur Tengah.

Dalam konteks ideologi di Timur Tengah dengan melihat kasus di atas, pada hakikatnya ideologi hanyalah digunakan sebagai kendaraan politik untuk legitimasi tujuan mereka dalam menguasai suatu negara dalam skala kecil dan regional dalam skala besarnya. Penggunaan pendekatan ideologi merupakan hal yang paling mudah digunakan, sebab hal tersebut dapat menimbulkan emosional antar beberapa pihak maupun masyarakat internasional secara umumnya. Maka tidak heran apabila baik Iran maupun Saudi Arabia kerap kali menggunakan pendekatan ideologi untuk tujuan politik luar negerinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abouzeid, R. (2011, Maret 22). *Syria's Revolt: How Graffiti Stirred an Uprising*. Dipetik April 2018, dari Time USA: <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2060788,00.html>
- Akbar, C. (2016, Desember 20). *Yang Perlu Diketahui: Apa Perang Suriah, Rezim Bashar dan Keterlibatan Syiah?* Dipetik April 2018, dari Hidayatullah.com: <https://www.hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2016/12/20/108058/yang-perlu-diketahui-apa-perang-suriah-rezim-bashar-dan-keterlibatan-syiah.html>
- Baidawi, A. (2012). Daya Tahan Rezim Bashar Al-Assad Terhadap Tekanan di Syria. *Jurnal Skripsi UMY*.
- Budiman, H. (2016). Kebijakan Luar Negeri Pakistan Menolak Bergabung ke Koalisi Militer Arab Saudi Dalam Menghadapi Konflik Yaman. *JOM Fisip Universitas Riau*.
- Byman, D. L. (2006, Juli 19). *Syria and Iran: What's Behind the Enduring Alliance?* Dipetik Mei 2018, dari Brookings: <https://www.brookings.edu/opinions/syria-and-iran-whats-behind-the-enduring-alliance/>
- Charin, R. O. (2016). Kepentingan Iran Melakukan Intervensi Terhadap Konflik Internal di Yaman Tahun 2014-2015. *JOM Fisip Universitas Riau*, 1-15.
- Dacey, J. B., & Levy, D. (2013). *The Regional Struggle for Syria*. London: European Council on Foreign Relations.
- Ikhsan, F. (2015). Kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi Terhadap Krisis di Syria (2011-2014). *JOM Fisip Universitas Riau*.
- Kansil. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Landry, C. (2015, Mei 1). *UN: Iran Arming Houthi Rebels Yemen Since 2009*. Dipetik April 2018, dari The Times of Israel: <http://www.timesofisrael.com/un-iran-arming-houthi-rebels-in-yemen-since-2009/>
- Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Buku Obor.
- Nakamura, S. (2013). *Saudi Arabian Diplomacy during the Syrian Humanitarian Crisis: Domestic Pressure, Multilateralism, and Regional Rivalry for an Islamic State*. Diambil kembali dari <https://www.ide.go.jp/library/Japanese/>

Publish/Download/Seisaku/pdf/201307
_mide_13.pdf

Tyler, M., & Boone, A. M. (2012). *Rivalry in
The Middle East*. New York: Nova
Science Publisher.